

Temuan BPK Bersifat Administratif

Bank Kalbar Bantah Ada Unsur Korupsi

PONTIANAK—Pihak Bank Kalbar membantah adanya unsur korupsi dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penyelewengan penyaluran kredit kepada pemerintah daerah. Direktur Utama Bank Kalbar Sudirman HMY mengatakan,

temuan itu hanya bersifat administratif.

Bank Kalbar juga berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan rekomendasi BPK. "Kita belum bisa membantah secara tegas karena LHP BPK juga belum kita terima. Tetapi dari hasil diskusi kita dengan tim pemeriksa, tidak ada satu pun yang mengarah pada korupsi," katanya, Jumat (16/12)

◆ Ke Halaman 7 kolom 5

Temuan BPK Bersifat Administratif

Sambungan dari halaman 1

usai pertemuan dengan Komisi B DPRD Kalbar. Dalam pertemuan itu, rombongan Komisi B yang dipimpin oleh Nicodemus R Toun mempertanyakan tentang hasil temuan BPK yang dimuat oleh sejumlah media beberapa hari lalu. Ketika melaksanakan audit operasional pada 13 BPD seluruh Indonesia, BPK menemukan adanya pembayaran kredit yang tidak sesuai prosedur yaitu senilai Rp484 miliar.

Penyaluran kredit tersebut diantaranya tanpa memperhatikan tahun anggaran, dokumen persetujuan DPRD dan lain-lain. Kondisi ini terjadi di lima BPD yakni BPD Kalbar sebesar Rp2,7 miliar, BPD Papua Rp102 miliar, BPD Maluku Rp40 miliar, dan BPD Sulselbar Rp329 miliar.

Di sisi lain, BPK pun mendapati adanya pemberian bunga deposito yang melebihi tingkat suku bunga penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang saat ini 6,75 persen. Kondisi tersebut terjadi pada 7 bank yaitu BPD Kalimantan Barat, Bali, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan Barat dan Maluku.

Sementara menurut Sudirman, ada kekeliruan data dalam pemberitaan tersebut. "Di situ disebut Rp2,7 miliar. Padahal hanya Rp2,5 miliar," jelasnya. Kredit itu disalurkan Desember 2010 lalu kepada salah satu pemerintah daerah di Kalbar. Sudirman juga mengatakan, penyaluran pinjaman atau kredit kepada pemda ini memang lumrah dan diperbolehkan oleh aturan.

Biasanya, pinjaman itu karena

pemda mengalami defisit anggaran dan proses pembayarannya akan dimasukkan ke dalam APBD tahun berikut. "Penyalurannya langsung ke rekening pemda," tambahnya. Namun, Sudirman enggan menyebutkan Pemkab/pemkot mana yang kreditnya dianggap bermasalah tersebut dengan alasan demi kerahasiaan nasabah.

Menanggapi hasil temuan BPK ini, Bank Kalbar menurutnya sudah menyurati Bank Indonesia guna menyampaikan tanggapan atau klarifikasi. Dalam suratnya, Bank Kalbar menerangkan bahwa pemberian pinjaman itu telah sesuai dengan ketentuan dan syarat pinjaman. "Hal-hal terkait syarat dan ketentuan mengenai pinjaman pemda sudah kami pertimbangkan dalam analisis kredit," ujar Sudirman.

Pinjaman itu pun akan dilunasi pada akhir Desember 2011. Selama ini, proses pembayaran pinjaman tersebut juga berjalan lancar, termasuk bunganya.

Beda Penafsiran

Masalah muncul karena ada perbedaan penafsiran antara pemeriksa BPK dengan pihak Bank Kalbar terkait kredit jangka pendek dan jangka panjang. Bank Kalbar beranggapan bahwa kredit ini tergolong jangka pendek sehingga tidak perlu adanya dokumen persetujuan DPRD.

Sementara menurut BPK, walaupun pinjaman ini jangka pendek, menengah atau panjang, tetap harus melalui persetujuan DPRD karena melewati tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.

Karena itu, BPK merekomendasikan agar pihak Bank Kalbar segera berkoordinasi dengan sekretaris daerah guna melengkapi syarat persetujuan DPRD atas keberadaan pinjaman tersebut serta melakukan pelunasan. "Kalau pinjaman ini sudah dilunasi, masalah selesai," kata Sudirman.

BPK juga meminta Bank Kalbar untuk memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) penyaluran kredit kepada pemda sesuai PP Nomor 54 tahun 2005. SOP diharapkan memuat persyaratan tentang dokumen persetujuan DPRD. Pinjaman juga harus disajikan dalam APBD maupun laporan keuangan pemda serta pencairannya pun harus melalui kas daerah. Pihak Bank Kalbar menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan mencantumkan persetujuan DPRD dalam SOP penyaluran kredit pemda.

"Jadi tidak ada yang mengarah pada korupsi. Lagi pula, jumlahnya hanya sekitar dua miliar. Mungkin kalau di bank-bank BPD lain memang bermasalah karena ada yang jumlahnya puluhan sampai ratusan miliar," ujarnya. Sementara mengenai masalah bunga deposito di atas bunga LPS, Sudirman menerangkan bahwa hal ini pun lumrah diterapkan oleh bank-bank. Namun, perlakuan ini hanya diberikan untuk deposito di atas Rp2 miliar yang memang tidak lagi dijamin oleh LPS. "Selisihnya satu persen dari suku bunga LPS. Bank-bank lain juga begitu," terangnya. (ron)